

**ANALISIS KINERJA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN SURABAYA SELATAN**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh :

**ACHMAD YUNianto DWI PRAMULYA**

**NIM : 2012410965**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2015**

**PENGESAHAN RANGKUMAN  
TUGAS AKHIR**

Nama : Achmad Yunianto Dwi Pramulya  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Juni 1994  
NIM : 2012410965  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Kinerja Pencairan Tunggakan Pajak  
Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana  
Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Selatan

**Disetujui dan Diterima baik oleh:**

Ketua Program Diploma

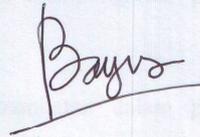
Tanggal : 31 Maret 2015



**Drs. Ec. Mochammad Farid, MM**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 31 Maret 2015



**Bayu Sarjono, SE., Ak., M.Ak., CA., BKP**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif nominal pajak yang dibebankan akan semakin meningkat berdasarkan status pengenaan pajak.

Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Perpajakan, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika Penanggung Pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

## 1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dari pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui kinerja dari pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui solusi atas hambatan-hambatan dalam pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

### 1.3 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah bagi penulis dapat memahami dalam kinerja pencairan tunggakan pajak, bagi pembaca untuk menambah wawasan, dan bagi STIE Perbanas Surabaya dapat menjadikan tambahan pustaka.

### 1.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan proses observasi dan interview.

### 2.1 LANDASAN TEORI

Menurut Kurniawan (2004), dijelaskan bahwa tunggakan pajak atau dikenal dengan pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya dalam tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mohamad Mahsun, 2013 : 25).

### 3.1 GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah merupakan salah satu Dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Jawa Timur dan cabang dinasnya tersebar di seluruh Jawa Timur. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan di pimpin oleh Kepala UPT yang bernama Ibu Dra.Ec. Endang Rachwati, MM membawahi Kasubag Tata Usaha yang dipimpin oleh Ibu Dwi Astuti, SH Ketua Pendataan dan Penataan dipimpin oleh Ibu Indrawulan, SH sedangkan Ketua Pembayaran dan Penagihan dipimpin oleh Ibu Anis Sulisdiana, SE. Ketua Administrator Pelayanan PKB/BBNK dipimpin oleh Ibu Liek Titik Ustiningsih, SE.

### 4.1 PEMBAHASAN

Prosedur dalam pencairan tunggakan PKB harus dilakukan penerbitan dan penyampaian surat perpajakan melalui dinas luar dan/atau pihak ketiga, yaitu meliputi :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
3. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4. Surat Peringatan Kedua (SP 2)
5. Surat Paksa

Dalam hambatan internal yaitu kurangnya pegawai yang bekerja di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan dalam memahami sistem prosedur (SAAP) yang berbasis komputerisasi dalam melaksanakan proses pencairan tunggakan pajak karena sebagian besar memiliki usia diatas rata-rata 35 tahun. Walaupun memiliki pengalaman yang cukup di bidang perpajakan namun faktor usia tersebut mempengaruhi kinerjanya sehingga proses pencairan menjadi terhambat. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dalam pengajuan keberatan mengenai Kendaraan Wajib Pajak. Pada umumnya wajib pajak beranggapan bahwa pengajuan keberatan yang sedang dilakukannya dapat menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan terhambatnya proses pencairan tunggakan pajak.

Solusi untuk hambatan internal yaitu pihak UPT hendaknya melakukan pelatihan komputerisasi dalam proses pencairan tunggakan yang berbasis SAAP kepada pegawai yang berusia diatas 35 tahun sehingga proses pencairan menjadi lebih mudah untuk dipahami dan tidak terhambat. Sedangkan solusi hambatan eksternal yaitu hendaknya pihak UPT melakukan pentingnya tindakan persuasif dan sosialisasi terhadap peraturan perpajakan agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan proses pencairan menjadi lebih mudah.

## 5.1 KESIMPULAN

Dalam Analisis Kinerja Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan berdasarkan Bulan dan

Triwulan sangat efektif karena mencapai target yang ditetapkan oleh UPT dan Kepala Dinas. Terdapat beberapa hambatan dalam proses pencairan tunggakan yaitu diantaranya internal dan eksternal. Solusi yang didapat untuk mengatasi hambatan dalam proses pencairan tunggakan salah satunya adalah pihak UPT melakukan pelatihan komputerisasi berbasis SAAP kepada pegawai yang berusia 35 tahun agar dapat mudah dipahami. Dalam instansi ini tujuan utamanya adalah mencapai target dalam pencairan tunggakan agar pendapatan asli daerah dapat meningkat.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, khususnya pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan, hal - hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak UPT lebih mengevaluasi kinerja dan target yang cukup rendah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 agar kinerja dan target pada tahun 2015 atau yang akan datang lebih meningkat sehingga proses pencairan dapat lebih baik dan dapat mencapai kategori efektif.
2. Hendaknya pihak UPT lebih mengevaluasi mengenai sistem dalam proses pencairan karena sistem pada UPT tersebut cukup rendah sehingga proses pencairan tidak dapat berjalan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFPE.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. Surabaya : Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Devano, Sony, dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Rosdiana, Haula, dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.